

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa pada Triwulan II tahun 2023, realisasi investasi mencapai angka Rp349,8 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar 6,3% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, serta tumbuh 15,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Dalam kondisi ekonomi yang terus berubah dan persaingan bisnis yang semakin intens, baik investor maupun manajemen perusahaan membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Salah satu sumber informasi penting tersebut adalah kinerja keuangan, yang merepresentasikan sejauh mana perusahaan berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suryaningrum & Ratnawati, 2024). Evaluasi terhadap kinerja keuangan tidak hanya bermanfaat bagi pemangku kepentingan seperti investor, lembaga keuangan, dan regulator yang membutuhkan gambaran jelas mengenai kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga untuk manajemen sebagai landasan dalam merumuskan strategi bisnis. Sehingga, penting bagi perusahaan untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan secara konsisten.

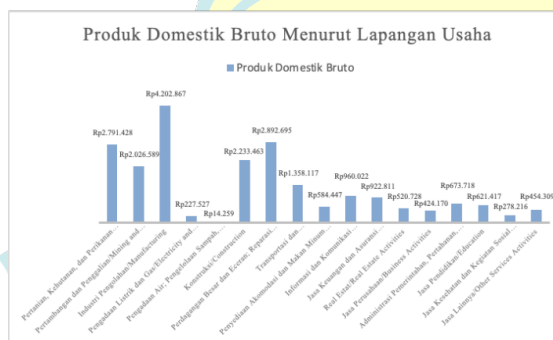
Dalam menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan, berbagai rasio keuangan dapat digunakan, termasuk rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, leverage, dan pasar (Sari, 2021). Untuk mengetahui seberapa baik suatu bisnis dapat menghasilkan laba relatif terhadap penjualan, aset tertentu, dan metrik lainnya,

seseorang dapat menggunakan rasio profitabilitas, maupun modal yang diinvestasikan oleh pemilik (Gitman & Zutter, 2015). Sebagaimana dijelaskan oleh Anggraini & Agustiningsih (2022), profitabilitas mencerminkan hasil dari investasi finansial yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan sumber daya internal. Kenaikan profitabilitas yang signifikan mengindikasikan pandangan positif terhadap prospek perusahaan di masa mendatang. NPM, ROE, dan ROA adalah rasio profitabilitas. Karena ROA mewakili tingkat pengembalian investasi yang diterima oleh investor, rasio ini dipilih sebagai variabel untuk mengukur kesuksesan keuangan dalam penelitian ini. Pasar menginterpretasikan kenaikan ROA sebagai bukti bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan investor dengan menghasilkan pengembalian investasi yang sehat. Selain itu, pertumbuhan ROA juga menunjukkan potensi perkembangan perusahaan yang menjanjikan di masa depan (Christiaan *et al.*, 2023).

Sedangkan *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan ekuitas yang tersedia (Lutfia & Febrilyantri, 2025). Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola modal pemegang saham untuk menciptakan keuntungan. Nilai ROE yang tinggi umumnya diinterpretasikan sebagai indikator efisiensi operasional dan kinerja manajerial yang optimal dalam mengkonversi investasi menjadi profit.

Sektor pertambangan memainkan peran penting dalam mendukung proses modernisasi peradaban manusia. Di Indonesia, sektor pertambangan tetap menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Data

dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024, sektor pertambangan menempati peringkat kelima sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan kategori lapangan usaha dengan nilai PDB sebesar Rp2.026.589 setelah sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, serta konstruksi.



Gambar 1. 1 Tingkat PDB Menurut Lapangan Usaha 2024

Sumber: bps.go.id



Gambar 1. 2 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2024

Sumber: bps.go.id

Selain itu, sektor ini menunjukkan peningkatan PDB sebesar 4,90% pada tahun yang sama, menjadikannya sektor dengan pertumbuhan tertinggi keempat. Dalam perspektif pembangunan, sektor pertambangan sering dipandang sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi karena kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Fitzpatrick *et al.*, 2011).

Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, aktivitas produksinya juga sangat rentan menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dan pencemaran ekologis. Isu degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin mengemuka, terutama di negara-negara berkembang,

dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas (Aftab *et al.*, 2023). Merespons hal ini, para pemangku kepentingan semakin menaruh perhatian terhadap praktik perusahaan dalam mengelola isu lingkungan, mendorong kepatuhan terhadap regulasi perlindungan lingkungan, dan penerapan budaya keberlanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagai implikasinya, semakin banyak perusahaan yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis guna menjaga daya saing di tengah dinamika pasar yang terus berubah (Sarwar *et al.*, 2023; Singh *et al.*, 2022).

Komitmen korporasi terhadap tanggung jawab atas dampak produksi dan operasionalnya, yang diwujudkan melalui program CSR, menjadi sangat penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat, perbaikan kondisi lingkungan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Franzoni *et al.*, 2021). CSR dipahami sebagai kewajiban perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, masyarakat luas, dan keberlanjutan pembangunan, serta merupakan bentuk aksi organisasi dalam merespons tantangan sosial dan lingkungan secara aktif (Xiong & Luo, 2021). Dalam konteks ini, CSR bukan hanya instrumen etis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan strategis yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan memperkuat relasi dengan berbagai *stakeholder* (Ramzan *et al.*, 2021). Beberapa penelitian menyoroti bahwa aktivitas pertambangan kerap menimbulkan ketegangan sosial, kelangkaan sumber daya, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia masyarakat lokal yang terdampak oleh operasi industri. Konteks ini menjadikan isu sosial sebagai isu penting dalam

praktik pertambangan, yang menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan hak masyarakat setempat sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka.

Sejumlah studi telah mencoba meneliti hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan, namun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Farooq *et al.* (2025) dan Jing *et al.* (2023) menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, yang terjadi karena respon positif dari *stakeholder* terhadap kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sebaliknya, temuan Lukiman & Wirianata (2024) menunjukkan bahwa CSR justru berdampak negatif signifikan, karena alokasi anggaran yang besar untuk aktivitas CSR dapat menjadi beban finansial yang menghambat pencapaian efisiensi kinerja keuangan.

Menurut UU Nomor 40 (2007), “direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Ukuran dewan direksi yang lebih besar menandakan lebih banyak anggota yang masing-masing memiliki potensi untuk membawa pengalaman, latar belakang, dan sumber daya yang berbeda (Doni *et al.*, 2022). Namun, dapat menimbulkan tantangan yang dalam hal koordinasi dan efisiensi (Boshnak *et al.*, 2023). Sedangkan, ukuran dewan direksi yang lebih kecil memudahkan dalam pengambilan keputusan sehingga lebih cepat serta dapat mengeluarkan lebih sedikit

biaya manajemen dan operasional, yang secara efektif mengurangi biaya perusahaan sekaligus menjaga kesehatan keuangan (Li *et al.*, 2024).

Penelitian (Hindasah *et al.*, 2021; Nguyen & Huynh, 2023) menunjukkan kesuksesan keuangan suatu perusahaan berkorelasi positif dengan ukuran dewan direksinya; dengan kata lain, dewan direksi yang lebih besar terkait dengan kinerja keuangan yang lebih baik. Karena manajer lebih cenderung bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan jika mereka memiliki kontrol dan manajemen yang baik atas organisasi. Namun, penelitian Natania *et al.* (2024) mendapatkan hasil negatif signifikan yang berarti semakin besar jumlah dewan direksi maka kinerja keuangan akan menurun, yang terjadi karena semakin besarnya tindak kecurangan serta menurunnya efektivitas dalam koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, diperlukan sistem pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tetap berada dalam koridor tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan tanggung jawab utama dewan komisaris serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tingkat kewenangan yang dimiliki oleh seorang komisaris berpengaruh terhadap sejauh mana mereka dapat mengakses sumber daya, menanggapi ekspektasi publik, dan menjalankan tanggung jawab secara akuntabel. Said *et al.* (2022) menekankan bahwa semakin besar peran dan kewenangan seorang komisaris, semakin besar pula pengaruhnya dalam mengatur dan mengawasi sektor industri yang menjadi tanggung jawabnya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberagaman dalam komposisi dewan komisaris turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan

melalui pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan efektif (Natania *et al.*, 2024). Namun demikian, tidak semua studi memberikan kesimpulan yang konsisten. Misalnya, Alfarizi *et al.* (2024) mengemukakan bahwa kedekatan atau afiliasi yang terlalu kuat antar anggota dewan dapat menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja optimal, sehingga peningkatan jumlah anggota dewan tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kinerja keuangan.

Di sisi lain, kepentingan pemegang saham harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap pengambilan keputusan manajerial. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional diyakini mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel (Jensen & Meckling, 1976). “Kepemilikan institusional yang merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh badan hukum yang mewakili kepentingan sejumlah besar investor, menjadi salah satu komponen penting dalam praktik *corporate governance*” (Kartikasari *et al.*, 2022).

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa tingginya proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap dinamika internal organisasi yakni dapat mengawasi pengelolaan perusahaan secara optimal dan berpotensi membuka akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan serta jaringan bisnis strategis (Natania *et al.*, 2024). Namun demikian, tidak semua penelitian menemukan pengaruh yang konsisten, Hindasah *et al.* (2021) menyatakan bahwa “tingginya kepemilikan institusional tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam mendorong pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik”. Hal itu terjadi karena sebagian besar kepemilikan institusional hanya

menjalankan tugasnya sebagai pemegang saham sementara atau yang dikenal dengan investor transit yang berfokus pada keuntungan jangka pendek.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun beberapa studi telah menunjukkan dampak positif CSR, dewan direksi, dan komisaris terhadap kinerja keuangan, studi lain menemukan dampak negatif, yang menunjukkan kurangnya penelitian yang konsisten tentang topik ini. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan dari segi pemilihan sektor pertambangan periode 2020-2023 untuk diteliti serta pemilihan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pengaruh variabel bebas dan terikat. Sehingga, penelitian ini dilakukan peneliti dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi, dan Dewan Komisiner Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan?
- 2) Apakah dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan?
- 3) Apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan?
- 4) Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan?

- 5) Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan?
- 6) Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan dewan direksi terhadap kinerja keuangan
- 3) Menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan
- 4) Menguji dan menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan
- 5) Menguji dan menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan
- 6) Menguji dan menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi berbagai pihak, baik dalam dunia akademik maupun untuk pengembangan bisnis. Berikut manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan terutama pada bidang keuangan
- 2) Mengisi gap atau kesenjangan penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kinerja Keuangan, dan Kepemilikan Institusional.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menjadikan sebagai pedoman dalam memperhitungkan kinerja keuangan perusahaan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dalam penelitiannya.
- 2) Bagi sektor pertambangan agar dapat menetapkan seberapa berpengaruh suatu *corporate social responsibility*, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi.
- 3) Bagi pemerintah dapat melihat seberapa besar potensi kinerja keuangan perusahaan sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian sehingga mampu bersaing dengan perusahaan di luar negeri dalam bentuk implementasi perekonomian dan bisnis yang ada di Indonesia.

Intelligentia - Dignitas